

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA
BANJIR DI KOTA MAKASSAR

Disusun Dan Diajukan

Oleh:

BAHRUL SAMUINDARWAN ISHAK

E051 171 314



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MITIGASI
BENCANA BANJIR DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan oleh :

BAHRUL SAMUINDARWAN ISHAK

E051 171 314

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal : 21 Juni 2024

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Nurlinah, M.Si
NIP.19630921 198702 2 001

Pembimbing Pendamping

Saharuddin, S.IP., M.Si
NIP.19960403 202204 3 001

Mengetahui,

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**

Dr. A. Lukman Iwan, S.IP., M.Si
NIP.19790106 200501 1 001



LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DALAM MITIGASI BENCANA
BANJIR DI KOTA MAKASSAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

BAHRUL SAMUINDARWAN ISHAK

E051 171 314


Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


Makassar, 28 Juni 2024


Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si ()

Sekretaris : Saharuddin, S.IP.,M.Si ()

Anggota : Rahmatullah, S.IP, M.Si ()

Anggota : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si ()

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si ()

Pembimbing Pendamping : Saharuddin, S.IP.,M.Si ()

iii



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bahrul Samuindarwan Ishak

Nomor Induk Mahasiswa : E051 171 314

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul:

“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA MAKASSAR”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Juni 2024

Yang menyatakan,



Bahrul Samuindarwan Ishak
Bahrul Samuindarwan Ishak



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA MAKASSAR.**” Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu **Abd Ishak S.Sos** dan **Hj Fitriah Bahri** yang telah tulus dan ikhlas dalam memberi kasih sayang, doa, materi, dukungan moral serta nasehat yang telah beliau berikan ke penulis selama ini. Kepada saudara penulis, **Alifmusyahril Ishak** yang telah membantu serta selalu mengingatkan penulis selama ini. Terima kasih dan Doa terbaik untuk kalian semua. Aamiin

Penyusunan dan penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater rah tercinta.



2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak **Dr. A. Lukman Irwan, S.IP.M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi selama proses penyelesaian studi.
4. Ibu **Prof. Dr. Nurlinah, M.Si** selaku pembimbing utama dan Bapak **Saharuddin, S.IP.,M.Si** selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak **Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si** dan Bapak **Rahmatullah, S.IP., M.Si.** sebagai Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen dan Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala Ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis selama mengenyam bangku perkuliahan.
7. Kepada Stakeholder dan informan penelitian yang terlibat dalam



mbantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis
am menyelesaikan skripsi ini yakni Pemerintah Kota Makassar,

dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar dan Camat Manggala beserta jajarannya.

8. Kawan Kawan PROLETAR : Wawan, Fadel, Ongkel, Ibnu, Farhan, Onco, Aryol, Dandis, Alfa, Jaka, Ade, Alam, Fikki, Razak, Utta, Acoy. Yang telah memberikan warna tersendiri selama menjalani dinamika kehidupan kampus.
9. Untuk teman-teman seperjuangan penulis “KAIZEN 2017” dari Masa Pengaderan, Saudara(i) tak sedarahku : Ari Yolanda Ilyas (Ketua Angkatan), Wawan, Farhan, Alfa, Alam, Apri, Razak, Baso, Fikri, Adhe, Fadel, Qadry, Piqqi, Ibnu, Utta, Dandis, Ulfi, Widy ,ilmi, Maulida, Yuyu, Nanda, Hasliana, Syarifa, Widya, Anna, Arni, Astry, Sabrina, Windy, Enil, Nisa, Aurel, Uni, dan atas kebersamaan dari Mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan telah memberikan pengalaman baru, pembelajaran hidup, serta arti persaudaraan.
10. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas, Teruntuk Kakak-Kakakku Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016 atas segala ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis dari awal menginjakkan kaki di Bumi Orange Hingga Akhir masa keanggotaan Di Himapem.



untuk Adik-Adik Eleftheria 2018, Zeitgeist 2019 Maintendrai 2020
dan Dignite 2021 yang telah memberikan pengalaman berorganisasi

di kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan. Semoga Identitas yang melekat tak akan lekang oleh Waktu .

12. Kepada Segenap Warga Kema FISIP Unhas atas pembelajaran dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis dari maba hingga akhir masa perkuliahan. Salam Biru Kuning, Semoga Semangat Bersama, Bersatu, Berjaya tetap terjaga tak terkikis oleh masa.
13. Kepada keluarga Besar Penulis atas segenap do'a, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tak henti-hentinya kepada penulis.
14. Kepada orang-orang Baik yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala jasa dan kebaikan baik dari segi moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis. Tetaplah baik dan menjadi manusia berguna bagi sesama.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam teknik penulisan maupun pembahasannya oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah lainnya di kemudian hari. Atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 01 Juni 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan teori.....	9
2.1.1. Peran.....	10
Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	12
Mitigasi Bencana Banjir.....	16



2.1.4.	Tugas Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana	20
BAB III METODE PENELITIAN.....		28
3.1.	Lokasi Penelitian	28
3.2.	Jenis Dan Tipe Penelitian	28
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4.	Informan Penelitian	30
3.5.	Sumber Data	31
3.6.	Fokus Penelitian.....	32
3.7.	Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1.	Sejarah Singkat Kota Makassar	36
4.1.2.	Letak Geografis dan Topografi	40
4.1.3.	Demografi.....	43
4.1.4.	Profil badan penanggulangan bencana daerah kota Makassar.....	44
4.2.	Peran Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Makassar	46
4.2.1.	Pra Bencana.....	57
	Saat Tanggap Darurat	69
	Pasca Bencana.....	78



4.3. Faktor–faktor yang mempengaruhi bencana banjir di Kota Makassar	81
4.3.1. Faktor Pendukung.....	81
4.3.2. Faktor Penghambat.....	83
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92



DAFTAR TABEL

1.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar.....	40
1.2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	42
1.3. Penggunaan Lahan Tahun 2013 dan Tahun 2023 Kec Manggala.....	49
1.4. Potensi Bencana Banjir Tahun 2013 dan Tahun 2023.....	50



DAFTAR GAMBAR

2.1. Peta Pemanfaatan lahan Tahun 2013 dan tahun 2023.....	48
2.2. Peta Potensi Bencana Banjir Tahun 2013 dan tahun 2023.....	51
2.3. Faktor faktor penentu efektivitas dalam sistem peringatan dini.....	65



ABSTRAK

Bahrul Samuindarwan Ishak, nomor induk mahasiswa E051171314, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, dengan Skripsi yang berjudul: “Peran Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Makassar”. (Dibimbing Oleh **Prof. Dr. Nurlinah, M.Si** sebagai Pembimbing Utama dan **Saharuddin, S.IP., M.Si** sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menggambarkan Peran Pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Makassar serta faktor faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di kota Makassar.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mitigasi bencana banjir di kota Makassar. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di kota Makassar berupa perbaikan sistem drainase, peringatan dini yang efektif, pendidikan dan kesadaran publik, serta pembuatan bendungan. Selain itu, upaya pemerintah membagi mitigasi bencana banjir menjadi tiga tahapan diantaranya adalah pra bencana, saat tanggap darurat, serta pasca bencana. Faktor faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mitigasi bencana banjir terdiri dari faktor pendukung yaitu sinergitas antar instansi dalam jajaran pemerintah daerah kota Makassar, koordinasi vertikal BPBD kota Makassar dengan instansi pemerintah yang berkedudukan lebih tinggi. Selain itu, faktor penghambatnya yaitu, terbatasnya sumber daya, perubahan penggunaan lahan.



nci: Peran Pemerintah, Mitigasi, Bencana Banjir.

ABSTRACT

Bahrul Samuindarwan Ishak, student number E051171314, Department of Government Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, with a thesis entitled: "The Role of Local Government in Flood Disaster Mitigation in Makassar City". (Supervised by **Prof. Dr. Nurlinah, M.Si** as Main Supervisor and **Saharuddin, S.IP., M.Si** as Accompanying Supervisor).

This study aims to determine and describe the Role of the Government in mitigating flood disasters in Makassar City as well as factors that influence the government's role in mitigating flood disasters in Makassar City.

This type of research uses a qualitative approach with descriptive elaboration. A qualitative approach with descriptive elaboration is a study that aims to obtain an overview to understand and explain the role of local governments in mitigating flood disasters in the city of Makassar. The data collection in this study used observation techniques, interviews, literature studies, and documentation studies.

The results showed that the government's role in mitigating flood disasters in the city of Makassar was in the form of improving drainage systems, effective early warning, education and public awareness, and making dams. In addition, the government's efforts to divide flood disaster mitigation into three stages, including pre-disaster, during emergency response, and post-disaster. Factors that influence the role of the government in flood disaster mitigation consist of supporting factors, namely synergy between agencies in the ranks of the Makassar city local government, vertical coordination of BPBD Makassar city with government agencies in higher positions. In addition, the inhibiting factors are, limited resources, changes in land use.

Keywords: Government Role, Mitigation, Flood Disaster.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, akibat berbagai bencana alam seperti Gempa bumi, tsunami dan banjir. Diantara macam bencana yang telah disebutkan dan cukup mengancam salah satunya adalah banjir. Banjir masih mendominasi jenis bencana di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi setiap kali musim penghujan terjadi. Kondisi ini memberikan banyak dampak bagi Indonesia baik dalam hal positif ataupun negatif. Salah satu dampak positif yang diperoleh yaitu banyaknya keragaman flora dan fauna serta dapat mendukung potensi sumber daya alam Indonesia. Disamping itu, curah hujan yang tinggi juga dapat menimbulkan efek negatif seperti terjadinya bencana banjir.

Dalam kaitannya dengan bencana, banjir juga termasuk kategori sebuah bencana alam apabila peristiwa atau rangkaian kondisi yang terjadi tersebut mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat. Baik dari segi faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.



Kondisi Banjir di Indonesia dapat dikatakan sebagai bencana siman, hal ini dikarenakan setiap kali musim penghujan tiba maka banjir pasti melanda beberapa wilayah di Indonesia. Menurut

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 1 tentang Penanggulangan bencana, banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi (Rahayu, 2009). Selain itu, banjir juga dapat terjadi akibat limpasan air permukaan yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran seperti drainase atau badan air.

Adapun lima faktor penyebab terjadinya banjir di Indonesia antara lain faktor penghujan, faktor rusaknya retensi daerah aliran sungai (DAS), faktor kesalahan perencanaan pembangunan saluran sungai, faktor pendangkalan sungai, dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana (Hermon,2012).

Berdasarkan data yang tercatat oleh badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Bencana banjir merupakan peristiwa yang kerap terjadi selama kurang waktu 1999 - 2020 (update tahun 2023) dimana telah terjadi 458 peristiwa banjir dengan kerusakan lahan mencapai 223.254 hektar serta 448 korban jiwa. Curah hujan yang mencapai rata – rata 1500 mm – 4000 mm di Sulawesi selatan mengakibatkan dampak potensi banjir yang cukup mengancam pada wilayah tersebut.



Makassar merupakan salah satu wilayah yang menjadi vasan rawan bencana banjir di Sulawesi selatan. Mengingat akan

bencana banjir yang melanda Kota Makassar yang menimbulkan dampak di berbagai kehidupan masyarakat Kota Makassar. Kecamatan terdampak salah satunya di Kecamatan Manggala, pada tahun 2020 lalu cukup menjadi pelajaran, bahwa pentingnya peran seorang pemerintah daerah dalam mengambil strategi yang harus dilakukan dalam melakukan penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar.

Banjir tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas, merusak badan-badan jalan dan prasarana lainnya akibat sering tergenang air, lebih jauh dapat menimbulkan kerugian materil bahkan korban jiwa. tetapi dalam bencana banjir yang melanda kecamatan Manggala ini tidak ada korban jiwa, hanya berbagai macam penyakit. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan banjir perkotaan ini, hal ini berbanding lurus dengan dana yang telah terkuras untuk masalah banjir ini, namun tetap saja belum berhasil mengatasi ancaman banjir tersebut. Hal ini akan semakin sulit diatasi dengan melihat kondisi buruknya infrastruktur penanganan banjir yang telah dibangun oleh pemerintah seperti misalnya saluran drainase, sehingga pembangunan demi pembangunan yang dilakukan dengan alasan penanganan banjir hanya menjadi rutinitas

pa solusi.



Genangan yang terjadi di beberapa wilayah Kecamatan Manggala Khususnya di wilayah Perumnas Antang Blok 10. daerah tersebut merupakan daerah terparah apabila musim hujan sedang berlangsung, hanya dalam waktu beberapa jam hujan turun, maka hampir separuh daerah tersebut sudah tergenangi. daerah tersebut sebelumnya merupakan kawasan resapan air yang kini telah dikonversi menjadi kawasan perumahan, dengan fasilitas drainase yang tidak sempurna menjadikan daerah tersebut sebagai kawasan rawan banjir karena hampir setiap saat tergenang, walaupun genangan tersebut bersifat periodik tapi itu sudah sangat meresahkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan masih rendah, kerja bakti yang dilakukan masyarakat untuk membersihkan selokan belum maksimal dijalankan oleh masyarakat, tersumbatnya saluran got karena banyaknya penumpukan sampah di selokan, menanamkan budaya lisa (lihat sampah ambil) yang dilakukan pemerintah daerah hanya sebagian masyarakat yang memperdulikan budaya tersebut, dan kesadaran masyarakat dalam membangun tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun setidaknya ukuran kanalnya misalnya 1 meter ternyata hanya 20 cm jadi kebijakan pemerintah

am membangun tidak sesuai, sehingga upaya-upaya pemerintah
ig dilakukan belum maksimal karena ketika musim hujan turun



maka akan terjadi banjir. Peristiwa sejarah banjir yang terjadi di Kota Makassar pada saat itu, menarik perhatian publik khususnya masyarakat Kecamatan manggala.

Dampak bencana yang ditimbulkan dapat berupa, pengangguran, Kemiskinan, Keterbelakangan dan hancurnya lingkungan hidup masyarakat, begitu besar resiko yang ditimbulkan oleh bencana banjir. Maka penanganan bencana banjir menjadi sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama dan pemerintah. Berdasarkan undang–undang sumber daya air, Nomor 7 Tahun 2004, Maka yang dimaksud Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daerah dataran yang merupakan suatu kesatuan sungai yang berfungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan kedanau atau kelaut secara alami, yang batas ke barat merupakan pemisah topografi dan di batas kelaut sampai dengan peraliran yang masih berpengaruh aktivitas daratan.

Apabila kita merujuk pada otonomi daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka sudah menjadi suatu kewajiban Pemerintah Kota makassar dalam mengatasi permasalahan di daerahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2010 termasuk dalam penanggulangan banjir.

h karena itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah bertanggung jawab dalam hal;

- Penjaminan pemenuhan hak masyarakat sesuai dengan standar minimum.
- Melindungi masyarakat dari dampak bencana banjir.
- Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan daerah yang memadai.

Merujuk pada kondisi banjir di kota Makassar yang terus berulang dan merugikan masyarakat, maka diperlukan mitigasi agar dapat mengurangi resiko (kerugian) pada saat terjadi bencana. Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007, mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun non fisik (penyadaran) dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Pengaturan terkait area penghijauan serta area rawa sebagai tempat penampungan air hujan merupakan salah satu bentuk mitigasi bencana banjir di kota Makassar, namun nyatanya area penghijauan yang dimaksud kini sudah beralih fungsi lahan menjadi area perumahan, perdagangan dan jasa. Selain itu, penyebab banjir di

Makassar juga diakibatkan oleh buruknya penataan kota dalam ini pengadaan drainase. Merujuk pada kondisi diatas maka



Penulis menyusun Penelitian ini dengan judul **”Peran Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Makassar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam Mitigasi bencana banjir di kota Makassar?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menggambarkan Peran Pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Segi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu pemerintahan, khususnya kajian yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Makassar.



2. Segi Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan jadi bahan acuan, pertimbangan dan evaluasi Pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Makassar selanjutnya.
3. Segi Metodologis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian mitigasi bencana banjir di Kota Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai teori-teori dan konsep yang digunakan, guna memperjelas juga menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam sehingga dapat memahami realitas yang ada. Konsep dan teori tersebut digunakan sebagai analisis terhadap masalah yang ada dan bersumber dari buku atau referensi lainnya. Berikut adalah tinjauan teoritis terkait peran pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di kota Makassar yang penulis jabarkan dan nantinya digunakan dalam menunjang analisis masalah diteliti :

2.1. Landasan teori

William Wiersma menyatakan bahwa: *A theory is a generalization or series of generalizations by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner.* Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Teori memiliki peran yang sangat penting, teori berperan membantu mendapatkan pengertian dan mengorganisasikan pengalaman. Di dalam teori terdapat posisi yang berperan penting dalam mengikhtisarkan informasi sehingga penafsiran, penilaian, dan pernyataan dapat terlaksana dengan mudah.



2.1.1. Peran

Setiap makhluk hidup dalam menjalani kehidupannya memiliki peran. Dalam melaksanakan perannya, terkhusus manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan latar belakang kehidupan manusianya itu sendiri. Peran yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) adalah:

- 1) Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- 2) Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- 3) Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Menurut Miftah Toha Peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan sebuah norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam Bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Hakikatnya peranan adalah perwujudan antara interaksi

g-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi kearah perubahan,



perbaikan, dan penyempurnaan organisasi (Thoha, 2008:80).

Soerjono Soekanto (2009:212), mengemukakan:

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009:212) menjelaskan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan aspek–aspek peranan sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma–norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.



Melihat beberapa pengertian peran diatas, dapat disimpulkan peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang maupun sekelompok orang (organisasi). Apabila melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Bila dikaitkan dengan tindakan pemerintah, maka dapat dikatakan peran adalah segala tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Sedangkan jika peran dihubungkan dengan pemerintah daerah dalam mitigasi bencana adalah posisi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun *kewajiban* yang seharusnya pemerintah daerah lakukan dalam menunjang mitigasi bencana banjir di suatu daerah.

2.1.2. Pemerintah Dan Pemerintah Daerah

Secara etimologi, Inu Kencana Syafii (2013:4) menjelaskan bahwa perintah, pemerintah dan pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.



Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut *Montesquieu* (dalam Salam, 2004:35) pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama *Trias Politica* baik itu Legislatif (membuat undang-undang), Eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun Yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6) pemerintah adalah : Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *Civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Pemerintah di Indonesia dibagi berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan Desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan pemerintahan.

Hal ini didukung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana



dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Undang-Undang yang dimaksud antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas

mi dan tugas. Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu asas yang harus dijalankan. Inu Kencana Syafii (2013:10) dalam bukunya menjelaskan asas tersebut adalah:

1. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi).
3. Sedangkan Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli di atas bahwa pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus memiliki sinergitas yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam hubungannya diperlukan aturan yang mengikat tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pemerintah mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan daerah.



Kedua lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas asas-asas pemerintahan yakni asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan hal itu, peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Mitigasi Bencana Banjir

Mitigas diartikan sebagai penjinak bencana alam, dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik, maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non-fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam. Menempatkan Korban di Suatu Tempat yang Aman adalah hal yang mutlak diperlukan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005, menyatakan bahwa: Negara-negara mempunyai tanggung jawab utama untuk

indungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah
anangan dan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang



tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka.

Mitigasi bencana dalam Nurjanah, dkk (2013) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan oleh suatu bencana. Mitigasi bencana berfokus untuk mengurangi dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari suatu bencana. Dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kegiatan mitigasi bencana didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dari bencana, baik dengan melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Secara umum kegiatan mitigasi bencana merupakan, sanksi dan penghargaan kepada manusia dalam rangka memberikan pemahaman dan kesadaran sehingga dapat mengurangi dampak dari suatu bencana.

Menurut Priyambodo (2009) terdapat dua unsur penting yang menjadi dasar keberhasilan mitigasi bencana yaitu unsur mikrokosmos dan makrokosmos.

1) Mikrokosmos merupakan pembangunan yang dilakukan dari unsur manusianya dengan cara peningkatan kesadaran manusia pada pola pikir dan pola hidup ataupun kebiasaan setiap individu;

makrokosmos merupakan pembangunan yang dilakukan pada unsur lingkungannya dengan memperhatikan keramahan bagi



setiap makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan yaitu karakteristik lingkungan dan hukum alam.

Mitigasi bencana banjir menurut Sofyana (2010), Kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir membantu masyarakat dalam membentuk dan merencanakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan ketika banjir. Kesuksesan dalam penanganan dan evakuasi/pengungsian ketika banjir sangat bergantung dari kesiapsiagaan masyarakat dan perseorangan itu sendiri. Bencana banjir terjadi, semua kegiatan akan dilakukan dalam situasi gawat darurat di bawah kondisi yang kacau, sehingga perencanaan, koordinasi dan pelatihan dengan baik sangat dibutuhkan supaya penanganan dan evakuasi ketika banjir berlangsung dengan baik.

Mitigasi bencana pada perumahan dan permukiman bertujuan untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang dapat terjadi pada tempat tinggal. Wilayah perumahan dan permukiman yang memiliki jumlah penduduk yang banyak akan sangat beresiko terjadi kerusakan dan kerugian yang besar ketika terjadi bencana sehingga perlu dilakukan mitigasi bencana pada wilayah perumahan dan permukiman.

Pada Peraturan menteri, Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 10 Tahun 2014 Bagian Kelima Pasal 21,

ksanaan mitigasi bencana banjir pada perumahan dan rukiman dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan perlu



melalui tahap identifikasi dan pemetaan zonasi kerawanan banjir. Identifikasi dilakukan untuk dapat menentukan alternatif dalam pengurangan risiko kerusakan bencana banjir. Sedangkan, pemetaan dilakukan terhadap kemiringan lokasi perumahan dan permukiman sehingga dapat mengurangi dampak bencana banjir. Berdasarkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2014 Pasal 22, prinsip-prinsip mitigasi bencana banjir untuk perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut.

- 1) Menghindari kawasan rawan banjir Apabila kita lakukan menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabnya terhambatnya saluran air.
- 2) Menghindari limpahan air GEnangan akan bertambah banyak saat tanah tidak mempunyai tingkat resapan air yang baik.
- 3) Mengalihkan aliran banjir dengan cara membangun aluran sungai baru yang mengakibatkan aluran sungai yang dialihkan tidak berfungsi secara permanen.
- 4) Pengendalian aliran air adalah suatu mekanisme atau sekumpulan komponen yang di rancang untuk mengelola, mengatur, dan mengendalikan aliran, distribusi dan pemanfaatan air dalam berbagai aplikasi.



2.1.4. Tugas Pemerintah Dalam Mitigasi Bencana

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Berdasarkan pada hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus merespon bencana alam. Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan kebijakan, praktik dan profesionalitas manajemen tanggap darurat dari sebuah perspektif pemerintah lokal. Upaya tersebut difokuskan pada pemerintah lokal sebagai level pertama tahap bencana. Respons merupakan hal yang penting untuk meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan bergantung pada pemerintah lokal.

Lembaga pemerintah yang berperan untuk mengkoordinasikan upaya penanganan bencana di tingkat daerah disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lembaga pemerintahan tersebut biasanya berada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan berperan

merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan tanggulungan bencana di wilayah tersebut. Peran BPBD sangat



penting dalam mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat serta aset di tingkat daerah. Mereka juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana dan memberikan edukasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk menghadapinya.

Peran BPBD di kota Makassar terkait mitigasi bencana banjir di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam peraturan wali kota Makassar nomor 4 tahun 2012 tentang uraian tugas jabatan struktural pada unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kota Makassar yaitu:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana;



- c. penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana;
- d. penyusunan program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana;
- e. penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana;
- f. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana;
- g. penghimpunan, pengolahan dan penyajian data potensi ancaman dan risiko bencana;
- h. penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan.

a. Seksi Pencegahan

1. Seksi Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasannya, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang dan tugasnya.



2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan risiko terjadinya bencana daerah;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan risiko bencana;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis risiko bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar didirikan untuk melakukan usaha pemerintah untuk menangani bencana secara keseluruhan. Tanggap darurat bencana adalah salah satu jenis Mitigasi bencana, bahwa kumpulan tindakan yang dilakukan saat bencana terjadi untuk menangani efek bencana. Selama bertahun-tahun, bencana alam

anggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikontrol manusia. Oleh



karena itu, untuk mengurangi dan menangani jumlah korban yang diperlukan.

Pemerintah seringkali hanya menangkap sebagian bencana. Penanggulangan bencana hanya dapat dilakukan melalui pendekatan saat bencana terjadi. Pemerintah bertugas untuk melaksanakan manajemen bencana, termasuk fokus pada rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana. Gangguan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh perilaku manusia yang salah dalam mengelola sumber daya air.

Melalui manajemen bencana ini, kita dapat mengantisipasi dan mengurangi potensi ancaman yang mungkin terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal Deby bahwa peran BPBD Kota Makassar memiliki dampak yang signifikan dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Supaya dapat mencapai penanganan bahaya yang efektif dan efisien. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar dirancang dengan baik agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara keseluruhan. Tujuan tersebut meliputi tidak hanya tanggap dalam situasi darurat, tetapi juga menyalurkan perhatian bagi semua prospek penanganan bencana dengan fokus pada manajemen resiko bencana.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab mengawasi segala aktivitas penanggulangan pada ahapan bencana. Adanya pengawasan tersebut, diharapkan aktivitas penanggulangan bisa sesuai rencana dan menghindari



penyelewengan dana penanggulangan bencana. Selain itu, dalam penanggulangan bencana yang kuat sehingga penyelenggaraannya bisa dilaksanakan secara terencana, terarah, dan lebih berkesinambungan. Pencegahan bencana bisa dilakukan yakni melarang pembakaran hutan, penambangan batu di daerah curam, atau bahkan bisa dilakukan melalui peringatan dini.

Fokus masalah pemerintahan daerah dan penanggulangan bencana semua terkonsentrasi pada pemerintah daerah. Ada beberapa alasannya, yaitu:

1. Penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah berperan aktif dalam penanggulangan bencana.
3. Memberikan kekuasaan yang besar kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
4. Kebijakan tanggap bencana diterapkan secara lokal.

Berdasarkan peraturan Wali kota Makassar No 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam hal ini Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan

situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi datar ancaman bencana. Sementara fungsinya secara umum terdiri



dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan dukungan teknis.

Gambaran di atas disusun menjadi sebuah kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:



Kerangka Konsep Penelitian

1. Undang-Undang N0. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034
4. Peraturan Wali Kota Makassar No.103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerjabadan Penanggulangan Bencana Daerah

Peran Pemerintah dalam Mitigasi Bencana Banjir di Kota Makassar :

1. Prabencana:
 - a. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - b. Informasi Prabencana
2. Saat tanggap darurat
 - a. Evakuasi
 - b. Penyediaan bantuan darurat
 - c. Komunikasi dan Informasi
3. Pasca bencana
 - a. Penilaian kerusakan
 - b. Pemberihan dan rehabilitas
 - c. Pemberian Bantuan keuangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam mitigasi bencana banjir di kota Makassar:

1. Faktor Pendukung:
 - a. sinergitas antar instansi dalam jajaran pemerintah daerah kota Makassar
 - b. koordinasi vertikal BPBD kota Makassar dengan instansi pemerintah yang berkedudukan lebih tinggi.
2. Faktor penghambat:
 - a. terbatasnya sumber daya
 - b. perubahan penggunaan lahan

Mitigasi Bencana Banjir

